



**DETERMINAN KEMISKINAN DAERAH PROVINSI DI INDONESIA:
TINJAUAN KEBIJAKAN PUBLIK**

***DETERMINANT OF POVERTY IN INDONESIAN'S PROVINCE:
A REVIEW OF PUBLIC POLICY***

Radite Teguh Handalani

BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Jl. Abdul Muis No. 66 Jakarta Pusat, 10160
Email: raditehandalani12@gmail.com

Naskah diterima: 12 September 2018; revisi terakhir: 25 Februari 2019; disetujui: 19 Maret 2019

How to Cite: Handalani, Radite T. (2019). Determinan Kemiskinan Daerah Provinsi di Indonesia: Tinjauan Kebijakan Publik. *Jurnal Borneo Administrator*, 15 (1), 59-80. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.373>

Abstract

This study aims to analyze poverty which is complex and multidimensional in terms of several aspects: physical and demographic, economic, social and behavioral aspect. However, the study of poverty problems often constrained by incompleteness and data integrity and it causes limitations on variables and aspects to be studied. Unlike some previous studies, the variables examined in this study not only underlie the study of poverty on the economic aspects and the concept of growth. However, this study was also included demographic aspects and physical mastery of resources, social aspects on education and human development index and aspect of behavior (lifestyle). This approach was applied to avoid hinder on poverty alleviation analysis due to data limitation with an adequate spectrum and dimensions so as to produce a representative model in finding determiner of poverty alleviation in Indonesia and its alternative policies. The method used in this study was carried out with a series of tests and multiple regression analysis using the ordinary least squares (OLS) method. Findings from study which used thirteen variables on related aspect of demographic, economic, social and behavioral aspects generated four variables that significantly influence the decline in the number of poor people in Indonesia.

Keywords: *Poverty Alleviation, Ordinary Least Squares (OLS), Determinant of Poverty, Multiple Regression Analysis*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi ditinjau dari beberapa aspek kehidupan yaitu: aspek fisik dan demografi, ekonomi, sosial dan aspek budaya (perilaku). Namun, kajian masalah kemiskinan, seringkali terkendala oleh ketidaklengkapan dan integritas data



sehingga menyebabkan keterbatasan pada variabel dan aspek yang hendak diteliti. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya variabel yang dikaji dalam penelitian ini tidak hanya melandasi kajian tentang kemiskinan hanya pada aspek ekonomi dan konsep pertumbuhan. Namun penelitian ini juga memasukan aspek demografi dan penguasaan fisik sumber daya, aspek sosial berupa pendidikan dan indeks pembangunan manusia dan aspek perilaku (gaya hidup). Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar keterbatasan data tidak menghalangi analisis tentang upaya pengentasan kemiskinan dengan spektrum dan dimensi yang memadai, sehingga dapat menghasilkan model yang representatif dalam menemukan variabel determinan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia beserta alternatif kebijakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan serangkaian pengujian dan analisis regresi berganda menggunakan metode *ordinary least squares* (OLS). Temuan dalam penelitian yang menggunakan 13 variabel yang terkait aspek demografi, ekonomi, sosial dan perilaku terdapat empat variabel berpengaruh signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Kata Kunci: Pengentasan Kemiskinan, *Ordinary Least Squares* (OLS), *Determinant of Poverty*, Regresi Berganda

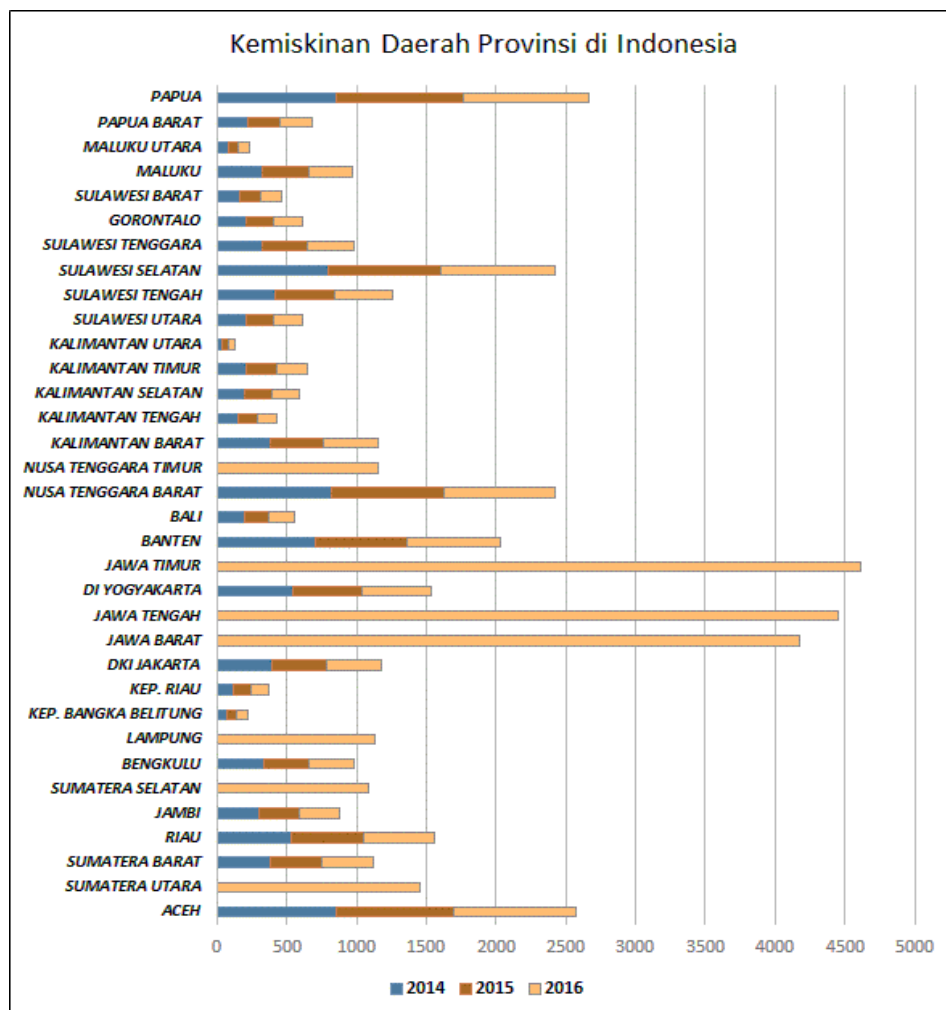
A. PENDAHULUAN

Eksistensi pemerintahan di setiap negara pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan derajat dan kualitas hidup masyarakatnya melalui proses pembangunan. Salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di berbagai negara adalah sejauh mana tingkat kemiskinan yang ada di negara tersebut dapat diatasi atau terus berkurang. Untuk mengurangi angka kemiskinan di setiap wilayah pemerintahan, maka program-program pembangunan di masing-masing daerah seringkali diarahkan pada sasaran penurunan jumlah penduduk miskin melalui upaya untuk meningkatkan angka-angka indikator aspek ekonomi. Dalam prakteknya penelitian-penelitian dan kajian analisis kebijakan tentang upaya pengentasan kemiskinan di wilayah dengan berbagai aspek sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian terdahulu sebagaimana dilakukan oleh [Santosa \(2013\)](#) yang melakukan kajian kemiskinan di 33 Provinsi dengan variabel-variabel bebas pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan daerah. Dalam lingkup daerah yang lebih kecil, kajian tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan daerah terhadap kemiskinan di daerah provinsi sebagaimana dilakukan oleh [Manek dan Badrudin \(2016\)](#) di Nusa Tenggara Barat dan [Azwar dan Subekan \(2016\)](#) di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dan kajian tentang determinan kemiskinan dengan berbagai variabel bebas yang beragam tersebut, dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sangat kompleks dan memiliki dimensi yang sangat luas.

Namun, jarang sekali ditemukan penelitian yang membahas pengentasan kemiskinan ditinjau dari aspek perilaku (pola hidup) penduduk dan keterkaitannya secara lebih luas dengan aspek-aspek lainnya seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam data yang relatif besar (*big data*). Bahkan sering ditemukan penelitian yang cenderung melakukan penelitian pada fokus masalah yang lebih kecil dan pada skala wilayah atau daerah yang lebih sempit. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh keterbatasan akses data sebagaimana



seringkali ditemukan pada data statistik yang dipublikasikan oleh beberapa institusi resmi seperti Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan bahkan World bank. Salah satu penyebabnya karena faktor kendala waktu (*time-lag*) penerbitan laporan dan proses publikasinya, sehingga seringkali ditemukan data-data yang kosong atau masih bersifat sementara. Penelitian ini mencoba merangkum dimensi yang lebih luas dengan menggali faktor-faktor yang menjadi determinan dari upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data-data yang berkaitan dengan aspek fisik kewilayahan dan kependudukan, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek perilaku. Aspek perilaku yang diwakili oleh pola hidup konsumsi merokok oleh penduduk di bawah usia 15 tahun di setiap provinsi menggambarkan preferensi dan gaya hidup. Di sisi lain gambaran perilaku, pilihan dan kecenderungan preferensi pola konsumsi juga diwakili oleh data asupan jumlah kalori di bawah 1400 kkalori per kapita per hari untuk memetakan pengaruhnya terhadap kemiskinan di Indonesia. Dalam tujuan tersebut, penelitian ini mencoba menggali dan merangkai dimensi aspek perilaku dan keterkaitannya dengan aspek dan dimensi lainnya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Gambaran kondisi tingkat kemiskinan penduduk di masing-masing provinsi di Indonesia sebagaimana data BPS Tahun 2014-2016 sebagai berikut:



Gambar 1.

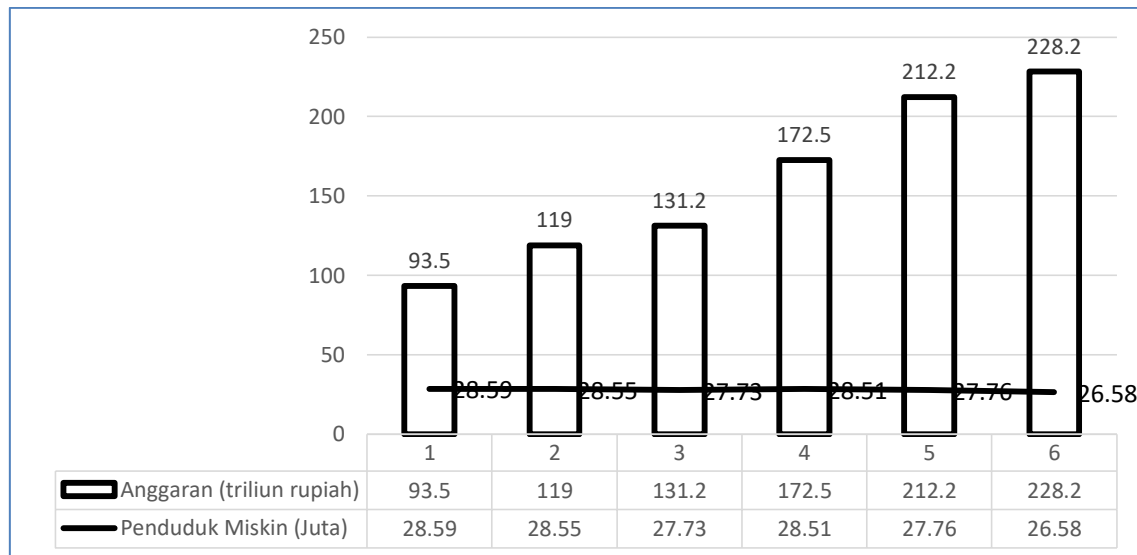
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016 (Sumber: BPS, data diolah)



Bagaimanapun baiknya sebuah pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam kenyataannya sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan mendefinisikan tingkat kemiskinan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pendekatan memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Contohnya, pendekatan kemiskinan melalui indikator-indikator ekonomi semata seperti Pendapatan Domestik Bruto dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB) atau Gross National Product (GNP) dan pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*). Secara konseptual angka PDRB bersifat agregat, sehingga kurang tepat dalam mengukur kualitas dan pemerataan kesejahteraan pada setiap individu di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi sebagai perbandingan data runtun waktu (*time series*) PDB/PDRB secara otomatis juga memiliki kelemahan. Di sisi lain, tingkat pendapatan per kapita yang menggunakan angka PDRB dibagi jumlah penduduk dengan sendirinya kurang mewakili penilaian kualitas. Hal tersebut sejalan dengan berbagai temuan dan kajian sebagaimana pandangan dan kajian [Ul-Haq \(2003\)](#), [Suryawati \(2005\)](#), dan [Nasikun \(2002\)](#).

Indeks pembangunan manusia (HDI) sebagai suatu indeks komposit di suatu negara yang diusulkan oleh [Ul-Haq \(2003\)](#) sebagai alternatif pendekatan kesejahteraan masyarakat melalui angka-angka ekonomi, secara konseptual lebih berlandaskan pada agregat pembangunan modal manusia untuk mencapai derajat kualitas tertentu. Dalam perkembangannya, pendekatan ini juga cukup lemah untuk menemukan kriteria penduduk miskin. Kelemahan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh [Suharto \(2009\)](#). Kelemahan lainnya, indikator-indikator pembangunan manusia sesuai laporan Bank Dunia dalam kenyataannya tidak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, padahal pelaksana penyelenggara pemerintahan terus berganti dan proses pembangunan terus berjalan. Hal tersebut sebagaimana data laporan Bank Dunia tentang Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) pada tahun 2017 Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara. Sedangkan pada Tahun 2016 Indonesia berada pada peringkat 113 dari 186 negara. Dalam prakteknya, sebagaimana diungkapkan [Gerke \(2003:88-97\)](#), [Isdijoso, Suryahadi, dan Akhmadi \(2016:5-9\)](#) dan [Cahyat \(2004:2-6\)](#) pengukuran kemiskinan di Indonesia menggunakan pendekatan yang berbeda sebagaimana dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional sehingga walaupun masing-masing pendekatan memiliki keunggulan dan landasan konseptual, namun tetap saja memiliki kelemahan-kelemahan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan sekaligus pengentasan kemiskinan di Indonesia terkenal dengan konsep pembangunan yang *Pro-Growth, Pro-Poor dan Pro-Job*. Dalam praktek pengentasan kemiskinan di Indonesia, selain melalui intervensi program dan kebijakan di kementerian-kementerian dan lembaga, bahkan dibentuk lembaga khusus Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Intervensi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui aspek kelembagaan, program dan kebijakan hingga aspek anggaran menandakan keseriusan dan kesungguhan dalam pengentasan kemiskinan. Namun dalam prakteknya, anggaran pendapatan dan belanja negara yang di dalamnya memuat anggaran pengentasan kemiskinan (*pro poor*) yang cenderung meningkat secara signifikan, tidak diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Hal tersebut memunculkan pertanyaan terhadap efektivitas dan efisiensi dalam program pengentasan kemiskinan, sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Gambar 2.

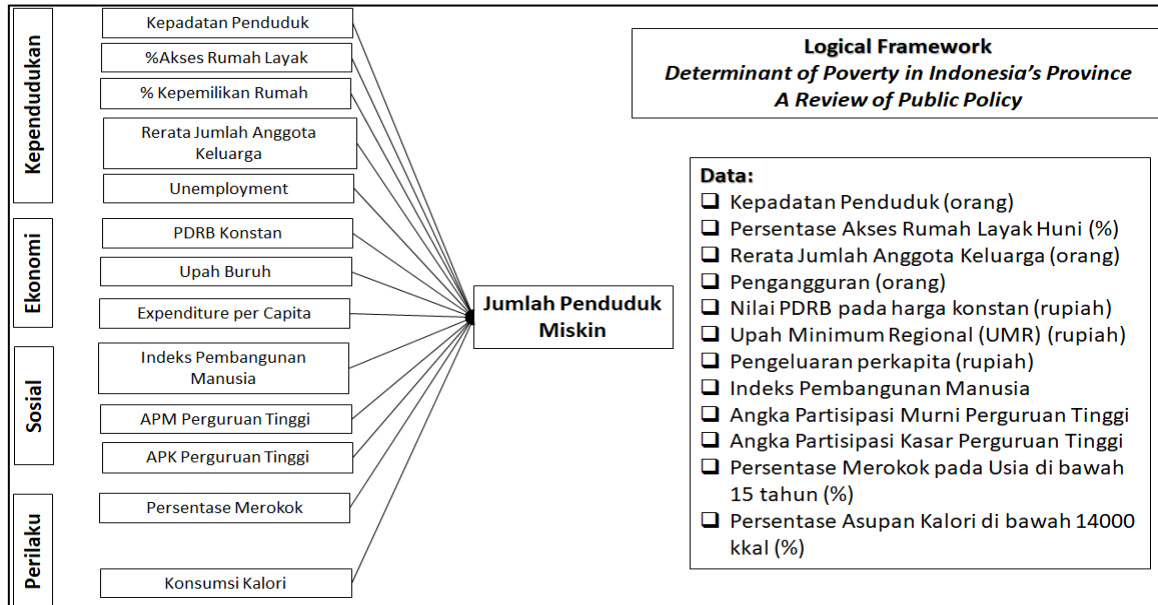
Perbandingan Trend Kenaikan APBN dan Penurunan Angka Kemiskinan (Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan RI data diolah)

Berdasarkan fenomena pembangunan dan pemberantasan kemiskinan tersebut variabel-variabel yang hendak diteliti dalam penelitian ini berkaitan erat dengan indikator-indikator pembangunan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Data yang dihimpun dan diolah dalam penelitian ini berupa data *cross section* di 34 Provinsi yang bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dalam data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dan dianalisis menggunakan pendekatan analisis regresi berganda menggunakan *Ordinary Least Squares (OLS)*. Langkah-langkah untuk membangun model dan melakukan analisis dalam penelitian ini mengikuti prosedur sebagaimana digambarkan dalam [Rosadi \(2012\)](#), [Nachrowi dan Usman \(2006\)](#) dan [Gujarati \(1997\)](#). Dari hasil analisis data maka dapat diketahui wilayah provinsi mana yang tergolong miskin dan sebaliknya provinsi mana yang relatif non-miskin sehingga dapat dilakukan intervensi kebijakan melalui program-program pembangunan. Dengan menggunakan berbagai indikator yang secara umum digunakan dalam mengidentifikasi kemiskinan sebagaimana dilakukan oleh [Pratama \(2014\)](#), [Dewi, Majid, Aliasudin, dan Kassim \(2018\)](#), [Hatta dan Azis \(2017\)](#) dan [Khumairoh, Efi EDS, Aida, dan Qomaria \(2018\)](#). Selain pendekatan indikator-indikator yang umum penelitian ini juga mengaitkannya dengan data pemenuhan kebutuhan pokok dan fisik dan sumber daya (aset) yang diwakili oleh: kepemilikan rumah sebagaimana diusulkan oleh [Nasikun \(2002\)](#), [Gerke \(2003:88-97\)](#), dan [Isdijoso, Suryahadi, dan Akhmadi \(2016:5-9\)](#) dan pendekatan indeks pembangunan manusia (IPM) sebagaimana digagas oleh [Ul-Haq \(2003\)](#) dan temuan variabel-variabel determinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kawasan Asia Tenggara ([Handalani, 2018:129-135](#)). Penggunaan variabel akses pendidikan yang dicerminkan oleh angka lamanya waktu menempuh pendidikan serta indikator jumlah penduduk di suatu daerah dalam penelitian ini, sejalan dengan temuan [Susanti \(2013\)](#), [Hatta dan Azis \(2017\)](#) dan [Septiani \(2017\)](#).



B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan metode deskriptif-kuantitatif ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di wilayah Provinsi di Indonesia. Data yang telah diperoleh berkaitan dengan variabel-variabel penelitian yang telah ditetapkan dalam model dan kerangka berpikir (*logical framework*), sebagaimana gambar 3, berikut:



Gambar 3.
Model dan Kerangka Berpikir

Untuk dapat melakukan kajian dan analisa keberhasilan pembangunan untuk mengurangi angka kemiskinan di setiap wilayah Provinsi maka perlu dibangun suatu model serta kerangka berpikir dengan pendekatan konsep dan teori, logika berpikir serta penerapan asumsi-asumsi dasar. Dalam makalah ini fokus utama pembangunan model dan kerangka berpikirnya adalah variabel dependen Jumlah penduduk Miskin di Provinsi dibandingkan dengan variabel-variabel independen yang mencakup aspek: ekonomi dan sosial, demografi dan perilaku. Variabel independen yang berkaitan dengan aspek ekonomi penelitian antara lain: nilai PDRB dalam harga konstan, upah buruh regional (UMR), nilai pengeluaran keluarga per kapita perbulan dan inflasi. Variable independen yang berkaitan dengan aspek sosial diwakili oleh variabel: indeks pembangunan manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni SLTA dan Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi. Variabel penelitian terkait aspek fisik wilayah dan kependudukan (demografi) antara lain: persentase kepemilikan rumah, kepadatan penduduk dan persentase akses rumah layak huni dan pengangguran (*unemployment*).

Selain itu, penelitian ini dikembangkan variabel yang berkaitan dengan perilaku (gaya hidup) masyarakat di wilayah Provinsi. Variabel tersebut adalah persentase masyarakat yang merokok pada usia di bawah 15 tahun dan jumlah konsumsi kalori di bawah 1400 kkalori perbulan. Penetapan variabel tersebut bertujuan untuk melengkapi pendekatan menggunakan aspek ekonomi, penguasaan fisik dan demografi serta aspek sosial, mengingat kemiskinan juga sangat terkait dengan pola hidup sebagaimana diuraikan oleh [Nasikun \(2002:4-6\)](#), [Suharto \(2009:32-33\)](#) dan [Suryawati \(2005:127\)](#) yang memandang bahwa individu-individu yang berada dalam kemiskinan juga dipengaruhi



oleh faktor-faktor pola hidup dan preferensi, budaya (kebiasaan) dan mental (budi pekerti). Untuk itu model yang dibangun untuk menjelaskan proses pembangunan dan pemberantasan kemiskinan di Provinsi di Indonesia adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Penduduk Miskin (ribuan)} = & \alpha + \beta_1 \text{Kepadatan penduduk} + \beta_2 \text{PDRB}_{(\text{harga konstan})} \\ & + \beta_3 \text{Persentase kepemilikan rumah} + \beta_4 \\ & \text{Persentase Akses rumah Layak Huni} + \beta_5 \text{Rerata} \\ & \text{Jumlah Anggota Keluarga} + \beta_6 \\ & \text{Pengangguran/Unemployment} + \beta_7 \text{PDRB harga} \\ & \text{konstan} + \beta_8 \text{Upah Buruh} + \beta_9 \text{Nilai Pengeluaran} \\ & \text{Per kapita dalam Sebulan} + \beta_{10} \text{Indeks} \\ & \text{Pembangunan Manusia (IPM)} + \beta_{11} \text{Angka} \\ & \text{Partisipasi Murni Perguruan Tinggi} + \beta_{12} \\ & \text{Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi} + \beta_{13} \\ & \text{Persentase Merokok pada Usia di bawah 15 tahun} \\ & + \beta_{14} \text{Persentase Asupan Kalori 1400 kkal/per} \\ & \text{kapita per hari.} \end{aligned}$$

Hipotesa Model

- H_0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Kepadatan Penduduk, Persentase Kepemilikan Rumah, Persentase Akses Rumah Layak Huni, Rerata Jumlah Anggota Keluarga dalam Satu Rumah, Jumlah Pengangguran, PDRB Harga Konstan, Upah Buruh, Pengeluaran Per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, Persentase Penduduk Merokok di Usia di bawah 15 tahun, dan Persentase Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah 1.400 kkalori/kapita/hari, secara keseluruhan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Daerah Provinsi di Indonesia.
- H_1 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel Kepadatan Penduduk, Persentase Kepemilikan Rumah, Persentase Akses Rumah Layak Huni, Rerata Jumlah Anggota Keluarga dalam Satu Rumah, Jumlah Pengangguran, PDRB Harga Konstan, Upah Buruh, Pengeluaran Per kapita, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, Persentase Penduduk Merokok di Usia di bawah 15 tahun, dan Persentase Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah 1.400 kkalori/kapita/hari, secara keseluruhan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Daerah Provinsi di Indonesia.

Hipotesa tersebut selanjutnya diuji dengan menggunakan metode regresi berganda (*multiple-regression*) terhadap data cross-section untuk setiap variabel di setiap Provinsi di Indonesia pada tahun 2016 dengan menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Squares*), menggunakan aplikasi *E-views 9.0*. Model tersebut dibangun dan dilandasi asumsi dasar dan logika sebagai berikut:



Variabel Dependen

Jumlah Penduduk Miskin Provinsi

Jumlah penduduk miskin di suatu Provinsi menggambarkan jumlah masyarakat yang perlu menjadi sasaran dan target pembangunan, sehingga semestinya keberhasilan pembangunan daerah secara otomatis akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Variabel kemiskinan diukur dengan angka jumlah penduduk miskin di setiap provinsi pada tahun 2016.

Variabel Independen

Kepadatan penduduk

Besarnya jumlah penduduk di suatu wilayah yang bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh faktor mobilitas seringkali berhadapan dengan masalah penyediaan fasilitas hidup yang memadai yang tercermin dari luas wilayah serta ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Untuk itu besarnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan kondisi wilayah tercermin pada data kepadatan penduduk, akan menjadi masalah bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana serta kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan temuan [Harlik, Amri Amir, dan Hardiani \(2013\)](#) dan [Darsyah \(2013\)](#). Persaingan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup di sisi lain jumlah sumber daya di suatu wilayah relatif terbatas akan berakibat semakin besarnya jumlah penduduk miskin. Dari konsep pembangunan hal tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan dalam melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi. Variabel kepadatan penduduk diukur dari data kepadatan penduduk per kilometer persegi di setiap provinsi pada tahun 2016.

Persentase kepemilikan rumah sendiri

Masyarakat yang sejahtera cenderung akan berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya yang salah satunya tercermin dari tingkat kepemilikan rumahnya. Dengan konsep tersebut maka semakin besar tingkat kepemilikan rumah di suatu Provinsi maka tingkat kemiskinan masyarakatnya semakin rendah. Hal tersebut mengacu pada indikator pengukuran kemiskinan dari aspek fisik sebagaimana [Gerke \(2003\)](#), [Nasikun \(2002:4-6\)](#), [Suryawati \(2005:127\)](#) sebagaimana dilakukan oleh BKKBN.

Persentase akses terhadap rumah layak huni

Hampir sama dengan variabel persentase kepemilikan rumah, persentase akses terhadap rumah layak huni menggambarkan pemenuhan kebutuhan fisik keluarga yang diperoleh dari persentase akses rumah layak huni baik milik sendiri, kontrak atau sewa. Masyarakat yang sejahtera cenderung akan berupaya memenuhi kebutuhan pokoknya yang salah satunya tercermin dari akses terhadap rumah layak huni. Dengan konsep tersebut maka semakin besar tingkat akses terhadap rumah layak huni di suatu Provinsi maka tingkat kemiskinan masyarakatnya semakin rendah. Variabel ini sejalan dengan indikator kemiskinan BKKBN ([Gerke, 2003:88-97](#)) dan ([Isdijoso, Suryahadi dan Akhmadi, 2016:5-6](#)) yang mengukur kemiskinan dari aspek hunian yang layak seperti lantai bangunan, luas tanah dan kondisi atap rumah.

Rerata Jumlah Anggota Keluarga

Keterbatasan akses hunian layak dan kepemilikan rumah pada daerah yang padat penduduknya di suatu wilayah dan di sisi lainnya menjadi tempat anggota keluarga yang relatif besar akan menjadi problema tersendiri dan pada akhirnya mempengaruhi kemiskinan di suatu wilayah. Penetapan indikator rata-rata jumlah anggota keluarga yang



tinggal dalam rumah merupakan modifikasi dari variabel akses rumah layak huni, kepadatan penduduk dan jumlah penduduk sebagaimana temuan [Harlik, Amir dan Hardiani \(2013:119\)](#), [Nasikun \(2002\)](#) dan [Suryawati \(2005\)](#).

Pengangguran

Angka pengangguran terbuka sebagai salah satu indikator dan masalah dalam rumah tangga akan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan kemiskinan karena keterbatasan penghasilan untuk menunjang hidup yang layak. Secara *common sense*, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengangguran akan berbanding lurus dengan jumlah/angka kemiskinan. Ketidakmampuan akses untuk mendapat penghasilan dan penghidupan yang layak akan berdampak pada munculnya masalah kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan temuan [Azwar dan Subekan \(2016:8\)](#), dan [Arsyad \(1999\)](#).

PDRB harga konstan

PDRB menggambarkan agregat kegiatan perekonomian yang terjadi di suatu wilayah yang dihasilkan dari proses produksi atau jumlah pengeluaran para pelaku perekonomian antara lain sektor rumah tangga, perusahaan dan pemerintah serta faktor-faktor produk milik asing yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan konsep tersebut, maka PDRB dapat secara tepat mewakili nilai *output* perekonomian yang terjadi di setiap Provinsi sehingga memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemiskinan penduduknya. Dengan melihat angka PDRB di masing-masing provinsi dapat terlihat agregat kegiatan ekonomi yang ada di suatu provinsi dan pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin di setiap provinsi. Untuk variabel PDRB harga konstans sebagai indikator ekonomi utama banyak menjadi variabel independen pada penelitian tentang kemiskinan sebagaimana [Pratama \(2014\)](#), [Septiani \(2017\)](#), [Dewi, Majid, Aliasudin, dan Kassim \(2018\)](#), [Khumairoh, Efi EDS, Aida, dan Qomaria \(2018\)](#) dan [Hatta dan Azis \(2017\)](#).

Upah Buruh

Tingkat upah buruh sangat berpengaruh pada besaran penghasilan keluarga di suatu wilayah, pada akhirnya juga menjadi salah satu pendorong jumlah penduduk miskin. Dengan bersandar pada logika sederhana dan konsep ekonomi pembangunan sebagaimana dijelaskan [Fei Guo and Zhiming Cheng \(2010:30\)](#). Penelitian ini juga memasukkan variabel upah buruh sebagai salah satu variabel independen sebagai salah satu penyebab angka kemiskinan.

Pengeluaran per kapita penduduk per bulan

Tingkat kesejahteraan penduduk seringkali tercermin pada tingkat konsumsi masyarakatnya. Dapat diartikan bahwa semakin sejahtera suatu masyarakat maka tingkat konsumsi per kapitanya semakin tinggi. Hal tersebut, secara nyata menggambarkan hubungan antara tingkat kesejahteraan masyarakat dengan jumlah penduduk miskinnya. Penetapan dan pengukuran variabel pengeluaran per kapita sebagai turunan dari PDB Regional dan jumlah penduduk secara otomatis masuk sebagai indikator dari aspek ekonomi sebagaimana kajian variabel PDRB harga konstan.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia sering digunakan untuk mengukur proses pembangunan manusia (*human capital*) yang dilaksanakan oleh setiap pemerintahan memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pemberantasan kemiskinan sebagaimana



diusulkan oleh [Ul-Haq \(2003\)](#). Beberapa penelitian dan temuan tentang pengaruh variabel IPM terhadap pengentasan kemiskinan sebagaimana hasil penelitian dan temuan [Hatta dan Azis \(2017\)](#), [Susanti \(2013\)](#) dan [Septiani \(2017\)](#).

Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi

Penduduk yang sejahtera akan semakin berupaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang tercermin pada Persentase penduduk yang mampu menempuh pendidikan yang lebih lama dalam hal ini lama pendidikan 16-18 tahun. Hal tersebut sejalan dengan pandangan [Harlik, Amir dan Hardiani \(2013:112\)](#). Sedikit berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya data yang sering digunakan adalah prosentase penduduk yang menempuh pendidikan 16-18 tahun. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel adalah APM Perguruan Tinggi. Hal tersebut dilandasi oleh asumsi bahwa wajib belajar 9 tahun dan kenyataan hampir di seluruh daerah sudah menerapkan pendidikan gratis selama wajib belajar. Asumsi lainnya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menghindari diri dari kemiskinan.

Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Tujuan penetapan variabel ini hampir sama Angka Partisipasi Murni (APK) namun dengan metode pengumpulan data yang berbeda maka perlu dikaji juga perbedaan kontribusinya bagi jumlah penduduk miskin. Penetapan variabel ini dilandasi kerangka konseptual yang sama dengan variabel angka partisipasi murni perguruan tinggi (APM PT) mengingat sebagian besar provinsi telah menerapkan pendidikan gratis hingga tingkat pendidikan SLTA.

Persentase Penduduk Merokok pada Usia sampai dengan 15 tahun

Dengan dilandasi tujuan analisis terhadap pola perilaku penduduk miskin sebagaimana pandangan [Suharto \(2016\)](#), [Nasikun \(2002\)](#) dan [Suryawati \(2005\)](#) aspek budaya, gaya hidup dan perilaku perlu dikaji dalam mengukur penduduk miskin. Hal tersebut dilandasi oleh konsep bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori miskin tidak hanya bersifat pasif namun juga aktif dalam menentukan pola hidup dan preferensinya. Dalam penelitian ini perilaku dan gaya hidup yang diwakili oleh variabel perilaku merokok di usia muda dan ketergantungannya (tingkat kecanduan), sehingga menyebabkan meningkatkan kebutuhan ekonomi dan pada akhirnya mendorong jumlah penduduk miskin di suatu Provinsi.

Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari Menurut Provinsi (Persen)

Penduduk yang miskin menurut konsep BKKBN, cenderung memiliki keterbatasan pada asupan kalori sehingga persentase penduduk di suatu daerah yang mampu mencukupi kebutuhan kalori per kapita per hari dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Hal tersebut sejalan dengan pandangan pengukuran BKKBN sebagaimana dijelaskan [Gerke \(2003\)](#), [Isdijoso, Suryahadi, dan Akhmadi \(2016\)](#) dan [Cahyat \(2004\)](#).



Data

Data yang dihimpun, diklasifikasi dan diolah dengan menggunakan aplikasi Eviews versi 9.0 adalah data *cross-section* di tiga puluh empat Provinsi di Indonesia tahun 2015 dan 2016. Adapun data kondisi variabel penelitian yang dihimpun dan dianalisa pada tahun 2016 dan 2015 disebabkan adanya kenyataan bahwa data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) memiliki jeda waktu (*time-lag*) dengan publikasi datanya. Dalam penelitian ini masalah tersebut juga ditemukan pada data upah buruh di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur tahun 2016 yang masih kosong sehingga digunakan data tahun 2015 dengan asumsi bahwa upah buruh tersebut tetap dan sangat kecil kemungkinannya untuk mengalami penurunan nilai.

C. KERANGKA TEORI

Dalam beberapa kajian di bidang administrasi dan ekonomi pembangunan masalah kemiskinan bersifat sangat kompleks dan multidimensional. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh [Nurkse \(1971:115\)](#). Bahkan dalam pandangannya [Nurkse \(1971:115\)](#) menyatakan bahwa negara yang miskin disebabkan oleh negara tersebut memang miskin dalam hal penguasaan atas sumber daya ekonomi, kapital dan kapabilitasnya. Hal tersebut seringkali dihubungkan dengan keyakinan Nurkse tentang adagium *lingkaran setan kemiskinan* (*Vicious circle of Poverty*) sebagaimana dikonfirmasi dengan penelitian terkini [Peilin Li and Haiying Ma \(2015\)](#). Beberapa dimensi dan aspek yang seringkali menjadi fokus dalam penelitian pengentasan kemiskinan antara lain aspek: ekonomi dan sosial serta aspek kependudukan (demografi). Penelitian yang fokus pada aspek ekonomi sebagaimana [Dewi, Majid, Aliasudin, dan Kassim \(2018\)](#) yang sejalan dengan hasil penelitian [Hatta dan Azis \(2017\)](#), maupun [Khumairoh, Efi EDS, Aida, dan Qomaria \(2018\)](#). Beberapa indikator ekonomi yang seringkali menjadi variabel penelitian dalam upaya pengentasan kemiskinan antara lain: pertumbuhan ekonomi (*economic-growth*) dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan, *income* dan/atau pengeluaran per kapita, inflasi dan beberapa variabel lainnya sebagaimana dijelaskan dalam [Pratama \(2014:221\)](#).

Dengan menggunakan berbagai ragam pendekatan yang berbeda, beberapa penelitian lainnya justru lebih memfokuskan pada aspek sosial yang mendorong kemiskinan di suatu daerah. Faktor sosial yang seringkali diangkat dan menjadi fokus penelitian sebagaimana dijelaskan [Septiani \(2017:10\)](#) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Daerah dalam pengentasan kemiskinan di Yogyakarta. Sebelumnya dengan tujuan melengkapi kelemahan pengukuran dari aspek ekonomi ([Ul-Haq, 2003](#)) mengajukan gagasan pengukuran kemiskinan dengan Human Development Index (HDI-UNDP) sebagai indeks komposit. Temuan pengaruh IPM tersebut sejalan dengan beberapa penelitian lainnya sebagaimana dalam [Hatta dan Azis \(2017:26\)](#) dan [Susanti \(2013:16\)](#) yang juga menyatakan bahwa ada pengaruh dengan arah negatif dari Indeks Pembangunan Manusia terhadap pengentasan kemiskinan secara signifikan.

Penelitian tentang pengentasan kemiskinan seringkali juga menyoroti aspek-aspek yang lebih kecil misalnya aspek keuangan mikro (*microfinance*) sebagaimana dilakukan [Hadi, Wahyudin, Ardiwinata, dan Abdu \(2015\)](#), pengaruh variabel zakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan ([Jaelani, 2016:18](#)) dan ([Tambunan, 2012](#)). Bahkan dalam dimensi yang jauh lebih sempit [Nahar dan Arshad \(2017:174\)](#) melakukan penelitian pada proses *remittance* dari tenaga kerja di luar negeri yang secara bersama-sama dengan inflasi dan nilai tukar memiliki dampak yang signifikan dengan arah hubungan yang bersifat negatif terhadap upaya meredusir dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya,



dalam dimensi yang lebih luas dan bersifat teknis upaya untuk mengukur tingkat kemiskinan juga dilakukan para peneliti terdahulu sebagaimana dilakukan dalam [Gerke \(2003:94-96\)](#), yang memetakan teknis pengukuran kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan hasil data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh Badan Pusat Statistik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan yang memiliki dimensi yang sangat luas dan sangat terkait dengan berbagai aspek kehidupan di suatu wilayah atau negara memerlukan pendekatan yang berdimensi luas dan kompleks. Namun, patut disayangkan bahwa kebutuhan tersebut seringkali terkendala oleh ketidaklengkapan data untuk selanjutnya dapat dianalisis, sehingga menyebabkan keterbatasan pada variabel dan aspek yang hendak diteliti. Ketidaklengkapan data tersebut disebabkan oleh faktor adanya selisih waktu (*time-lag*) dalam penyajian data publikasi atau bahkan ketidaklengkapan data karena masalah pendataan survei statistik. Data-data publikasi sebagaimana dirilis oleh lembaga-lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan seperti: Badan Pusat Statistik, Bappenas, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, UNDP dan lembaga lainnya, seringkali tidak lengkap terisi untuk semua variabel. Hal tersebut dapat membatasi kajian dan analisis bagi variabel-variabel penelitian yang bersifat kompleks dan multidimensional sebagaimana halnya kemiskinan, pembangunan, kesejahteraan dan aspek kehidupan lainnya. Menghadapi keterbatasan dan ketidaklengkapan data tersebut, variabel variabel yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan dengan upaya mencari data sekunder yang lengkap sehingga mampu mencakup dan mewakili aspek kewilayahan, fisik dan demografi, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek perilaku. Pendekatan ini dilakukan dengan tujuan agar keterbatasan data tidak menghalangi analisis tentang pengentasan kemiskinan dengan spektrum dan dimensi yang memadai sehingga dapat menghasilkan model yang representatif dalam menemukan determinan yang mendorong keberhasilan pengentasan dan alternatif kebijakannya. Selain itu, untuk menemukan model terbaik maka model estimator yang mampu mengukur variabel dependen jumlah penduduk miskin secara akurat dan tepat harus memenuhi prinsip BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) setelah melalui serangkaian pengujian (test). Hasil pengujian dan analisis terhadap data setelah melalui berbagai metode dan prosedur penelitian yang memadai dapat diuraikan sebagai berikut:

Estimasi Model dan Interpretasi Data

Dari hasil estimasi OLS menggunakan aplikasi eViews 9.0 model secara tepat dapat mengukur dan menduga jumlah penduduk miskin di suatu Provinsi di Indonesia dengan derajat/tingkat keyakinan sebesar 95% dan p-value pada $\alpha=0,05$. Hal tersebut terlihat dari nilai F-statistic sebesar 21,66213 dan Prob(F-stat) 0,0000000 yang lebih kecil dari nilai p-value $\alpha=0,05$. Di sisi lain, dengan nilai R-squared sebesar 0,933689 menandakan bahwa model memberikan kontribusi dalam menduga jumlah penduduk miskin sebesar 93,37%. Namun dari hasil uji t menggambarkan bahwa dalam model sangat besar potensi terjadinya multikolinieritas yang menggambarkan korelasi antar variable. Dari hasil perbandingan terhadap nilai t-statistic dan nilai Prob t-statistic dapat disimpulkan bahwa hanya variabel PDRB pada harga Konstan dan Upah Buruh yang signifikan dan tepat mengukur jumlah penduduk miskin sedangkan variabel-variabel lainnya tidak signifikan. Untuk itu perlu dilakukan proses pengujian dan estimasi secara berulang-ulang (*trial and error*) untuk mendapatkan model terbaik. Setelah dilakukan proses identifikasi dan pengukuran ulang



(*trial and error*) teradap variabel Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi (ribuan orang), diperoleh hasil terbaik sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Estimasi Terbaik Jumlah Penduduk Miskin Provinsi di Indonesia

Variabel	Nilai Koefisien	Standar error	t-Statistic	Prob-Statistic	Keterangan
Konstanta Penduduk Miskin	-1687.564	911.4056	-1.851606	0.0743	Tidak signifikan
Persentase Kepemilikan Rumah	33.32806	10.52758	3.165786	0.0036	Signifikan
Kepadatan Penduduk	-0.190891	0.041304	-4.621586	0.0001	Signifikan
PDRB pada Harga Konstan	3.20E-06	3.12E-07	10.2421	0.0000	Signifikan
Upah Minimum Regional (UMR)	-0.000492	0.000229	-2.149926	0.0400	Signifikan
R-squared	0.900674	Dengan tingkat signifikansi 95% dan $\alpha = 0.05$			
Adjusted R-squared	0.886973				
F-statistic	65.74168				
Prob(F-statistic)	0.00000				
Prob(Wald F-statistic)	0.00000				

Sumber: Hasil pengolahan data E-Views data cross-section 34 Provinsi Tahun 2016.

Uji Asumsi Dasar

a. Uji Normalitas Data

Dari tabel sebagaimana terdapat dalam grafik pada lampiran 2 dapat dijelaskan bahwa dengan nilai Jacques-Bera test senilai 0,747391 dan Probability bernilai 0,687382 yang lebih besar dibandingkan dengan nilai p-value α 0,05 maka dapat dijelaskan bahwa data pada model berdistribusi normal dan dapat disimpulkan bahwa residual juga bersifat normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji korelasi antar variabel dalam penelitian sebagaimana Tabel 2, berikut ini:

Tabel 2.
Nilai Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas	Jumlah Penduduk Miskin	Upah Buruh (UMR)	Kepadatan Penduduk	Rata-rata Anggota Keluarga	Persentase Kepemilikan Rumah	PDRB Harga Konstan
Jumlah Penduduk Miskin	1	-0.415107	0.030256	-0.018916	0.300691	0.717514
Upah Buruh (UMR)	-0.415107	1	0.4179	0.234189	-0.560393	0.073863
Kepadatan Penduduk	0.030256	0.4179	1	0.669189	-0.600167	0.632646
Rata-rata Anggota Keluarga	-0.018916	0.234189	0.669189	1	-0.596541	0.484271
Persentase Kepemilikan Rumah	0.300691	-0.560393	-0.600167	-0.596541	1	-0.279575
PDRB Harga Konstan	0.717514	0.073863	0.632646	0.484271	-0.279575	1

Sumber: Hasil pengolahan data E-Views data cross-section 34 Provinsi Tahun 2016.



Sesuai hasil estimasi hubungan antar variabel penelitian sebagaimana tabel 2 di atas, nilai korelasi antar variabel dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dan tidak ada hubungan yang kuat antar variabel dalam model yang ditentukan nilai korelasi antar variabel berada di bawah 0,80 yang menandakan terjadinya korelasi yang kuat.

c. Uji Autokorelasi

Dari hasil pengujian Breusch-Godfrey Serial LM Test sebagaimana tabel hasil estimasi dalam lampiran 3 dapat dijelaskan bahwa model tidak mengandung autokorelasi yang terlihat dari nilai F-statistic dan Obs*R-Squared yang dapat diwakili oleh nilai Prob F(3,26) dan Prob Chi-Square baik pada lag 1 sampai dengan lag ke-3 semuanya berada di atas nilai p-value pada α 0,05. Dari hasil pengujian Breusch-Godfrey Serial LM-Test (hasil estimasi dalam lampiran), maka untuk menentukan estimator terbaik dilakukan analisis terhadap nilai *Akaike Criterion (AIC)* dan *Schwarz Criterion (SIC)* sebagai berikut dan dipilih nilai AIC dan SIC terkecil sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.
Pemilihan Estimator Terbaik Tanpa Faktor Korelasi

k	AIC	SIC	Keterangan
1	15.00274	15.2721	
2	14.98985	15.2721	Best Estimator tanpa adanya Autokorelasi
3	15.00369	15.36284	

Dari nilai AIC dan SIC terkecil, maka estimator terbaik dari uji Breusch-Godfrey Serial LM Test pada lag ke-2.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pada sebagian besar data *Cross-section* seringkali ditemukan adanya variansi dari *error* bersifat tidak tetap (berubah-ubah) sehingga terdapat pola non-random pada komponen *error*-nya (gejala heteroskedastisitas). Pada kondisi demikian maka estimator dapat dikatakan tidak memenuhi unsur BLUE, karena sangat mungkin terjadi hubungan antar komponen error pada data. Untuk itu, diperlukan pengujian apakah variansi komponen error tersebut bersifat tetap (homoskedastisitas) atau justru terjadi heteroskedastisitas sebagaimana dijelaskan [Rosadi \(2012:53\)](#). Untuk melihat ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dilakukan uji *White Heteroscedasticity Consistent Coefficient Covariance (White HC)* sebagai berikut:

Tabel 4.
Uji White HC

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	9.117254	Prob. F(14,19)	0.0000
Obs*R-squared	29.59470	Prob. Chi-Square(14)	0.0087
Scaled explained SS	26.39964	Prob. Chi-Square(14)	0.0230



Dari hasil nilai Uji White dengan membandingkan nilai F-statistic dan Obs*R-Squared atau nilai Prob F stat dan Prob. Chi Squared yang lebih kecil dari nilai P-value pada $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model (estimator) memiliki heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas maka dilakukan estimasi ulang dengan metode white atau Newey-West sebagaimana terdapat dalam lampiran 4. Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa estimator terbaik sebagaimana hasil pengujian Newey-West yang menghasilkan estimasi sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Pengujian Newey-West Menghilangkan Heteroskedastisitas

Variabel	Nilai Koefisien	Standar error	t-Statistic	Prob-Statistic	Keterangan
Konstanta Penduduk Miskin	-1687.56	659.759	-2.55785	0.0160	Signifikan
Persentase Kepemilikan Rumah	33.32806	7.973737	4.179729	0.0002	Signifikan
Kepadatan Penduduk	-0.19089	0.034355	-5.55644	0.0000	Signifikan
PDRB pada Harga Konstan	3.20E-06	2.90E-07	11.03976	0.0000	Signifikan
Upah Minimum Regional (UMR)	-0.00049	0.000164	-3.00907	0.0054	Signifikan
R-squared	0.900674	Dengan tingkat signifikansi 95% dan $\alpha = 0.05$			
Adjusted R-squared	0.886973				
F-statistic	65.74168				
Prob(F-statistic)	0.00000				
Prob(Wald F-statistic)	0.00000				

Sumber: Hasil pengolahan data E-Views data cross-section 34 Provinsi Tahun 2016.

Hasil estimasi tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kemiskinan (ribu)} &= 1687.56437233_{(0,0160)} - 33.3280607621^* \text{Persentase} \\ &\text{Kepemilikan Rumah Layak Huni}_{(0,0002)} + \\ &0.190891081548^* \text{Tingkat Kepadatan penduduk di Provinsi} \\ &_{(0,0000)} - 3.2002533824e-06^* \text{PDRB Pada harga konstan}_{(0,0000)} + \\ &0.000492395311247^* \text{Upah Buruh (UMR)}_{(0,0054)} \end{aligned}$$

Interpretasi Data

Dari hasil data dan informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai F-Statistik sebesar 65.74168 di mana Prob (F-Stat) sebesar 0.000000 derajat Pvalue < 0,05 pada tingkat $\alpha=0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa model signifikan mampu menjelaskan pengaruh variabel independen (X_1 s.d. X_4) terhadap variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin. Data tersebut menggambarkan bahwa Hipotesa Null ditolak atau dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel independen dalam model dalam menduga jumlah penduduk miskin provinsi di Indonesia. Dapat disimpulkan pula dari hasil t-statistic dan P-value dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yaitu: Persentase Kepemilikan Rumah, Tingkat kepadatan Penduduk, PDRB Harga Konstan dan Upah Buruh berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin daerah Provinsi di Indonesia. Di sisi lain, nilai R-Squared sebesar 0,900674 menandakan bahwa model mampu menjelaskan dan menduga faktor-faktor yang menjadi determinan bagi jumlah penduduk miskin di suatu Provinsi di Indonesia sebesar 90,07% dan sisanya sebesar 9,93% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak menjadi variabel penelitian ini. Sedangkan nilai R-Squared Adjusted bernilai 0,886973 setelah melalui proses kalibrasi



(*adjustmen*) model mampu menjelaskan determinan kemiskinan Provinsi di Indonesia sebesar 88,70% dan sisanya 11,30% dijelaskan oleh variabel lainnya selain persentase kepemilikan rumah, kepadatan penduduk, PDRB harga konstan dan Upah Buruh. Berdasarkan nilai masing-masing variabel independet (X_1 s.d. X_6) memiliki nilai lebih kecil dari nilai Pvalue pada tingkat $\alpha=0,05$ sehingga masing-masing variable signifikan dalam menduga variable jumlah kemiskinan di wilayah provinsi di Indonesia. Dapat disimpulkan pula dari hasil t-statistic dan P-value dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yaitu: Persentase Kepemilikan Rumah, Tingkat kepadatan Penduduk, PDRB Harga Konstan dan Upah Buruh berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin daerah Provinsi di Indonesia.

Dari nilai konstanta sebesar 1687.56437233 dengan standar deviasi sebesar 659.7590 dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 1.687.564-659.759 atau berjumlah 1.027.805 orang dengan asumsi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*). Sedangkan, persentase kepemilikan rumah memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi di Indonesia. Hal tersebut secara jelas terlihat dari nilai konstanta 33.3280607621 dengan nilai p-value sebesar 0,0002 yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dapat disimpulkan pula bahwa apabila persentase kepemilikan rumah di suatu Provinsi di Indonesia naik sebanyak 1% maka jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut akan turun sebanyak 33.328 orang.

Selain itu kepadatan penduduk memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi di Indonesia. Hal tersebut secara jelas terlihat dari nilai konstanta 0.190891081548 dengan nilai p-value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dapat disimpulkan pula bahwa apabila kepadatan penduduk di suatu provinsi di Indonesia naik sebanyak 1 orang per Km Persegi, maka kemungkinan jumlah penduduk miskin di Provinsi tersebut akan naik sebesar 191 orang. Berbeda dengan variabel kepadatan penduduk, variabel PDRB Harga Konstan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi di Indonesia. Hal tersebut secara jelas terlihat dari nilai konstanta 3.2002533824e-06 dengan nilai p-value sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dapat disimpulkan bahwa apabila nilai PDRB Harga Konstan di suatu Provinsi naik sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu Triliun Rupiah) maka kemungkinan penduduk miskin di provinsi tersebut akan turun sebanyak 3.200 orang. Di sisi lain, variabel upah buruh yang diwakili oleh Upah Minimum Regional memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi di Indonesia. Hal tersebut secara jelas terlihat dari nilai konstanta 0.000492395311247 dengan nilai p-value sebesar 0,0054 yang lebih kecil dari nilai $\alpha=0,05$. Dapat disimpulkan pula bahwa apabila upah buruh yang tercermin pada upah minimum provinsi (UMP) naik sebesar Rp10.000,00 maka kemungkinan penduduk miskin di Provinsi tersebut akan naik sebesar 5 orang.

Analisis Alternatif Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Dari hasil interpretasi data dan hasil analisis dapat dirumuskan bahwa dari model yang dibangun untuk melakukan estimasi terhadap variabel jumlah penduduk miskin di suatu provinsi dari 13 variabel independen hanya empat variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu: Persentase Kepemilikan Rumah, kepadatan penduduk, PDRB Harga Konstan dan Upah Buruh. Di sisi lain penelitian ini menemukan fakta bahwa variabel-variabel lainnya antara lain: Persentase Akses Rumah Layak Huni, Rerata Jumlah Anggota Keluarga dalam Satu Rumah, Jumlah Pengangguran, Pengeluaran Per kapita,



Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Murni Perguruan Tinggi, Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, Persentase Penduduk Merokok di Usia di bawah 15 tahun, dan Persentase Penduduk dengan Asupan Kalori di bawah 1.400 kkalori/kapita/hari, tidak signifikan dalam menduga Jumlah Penduduk Miskin Daerah Provinsi di Indonesia. Variabel Persentase Kepemilikan Rumah memiliki pengaruh signifikan dengan arah yang negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Dari hasil tersebut apabila Pemerintah melakukan intervensi dengan meningkatkan persentase kepemilikan rumah bagi masyarakat sebesar satu persen (1%) maka akan berdampak pada turunnya jumlah penduduk miskin di suatu provinsi sebesar 33.328 orang dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap. Untuk itu program pembangunan dan kebijakan yang dapat dilakukan misalnya dengan mendorong kepemilikan rumah masyarakat. Contohnya: melalui program pembangunan perumahan bersubsidi, pembangunan rumah susun milik (rusunami) dan program pembangunan rumah dengan Uang Muka (DP) Nol Rupiah. Hal tersebut akan mendorong masyarakat miskin dapat memiliki kesempatan untuk terbebas dari kemiskinan karena telah terpenuhi kebutuhan pokok berupa papan dan berkurangnya beban sewa atau kontrak rumah. Penelitian ini sejalan dengan pandangan [Nasikun \(2002:4-6\)](#) dan [Suryawati \(2005:127\)](#). Temuan ini berbeda dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya yang tidak melakukan kajian atas variabel kepemilikan rumah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kepadatan penduduk di wilayah provinsi memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap jumlah penduduk miskin. Dari hasil analisis dan estimasi model dengan asumsi variabel lainnya tetap maka apabila terjadi kenaikan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1 orang per kilometer persegi maka akan mendorong meningkatnya jumlah penduduk miskin sebesar 191 orang. Alternatif kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan antara lain melakukan penyebaran dan pemerataan distribusi penduduk melalui program transmigrasi terutama di wilayah padat penduduk dan perkotaan serta menciptakan wilayah baru pusat kegiatan perekonomian dengan konsep aglomerasi. Selain itu, program keluarga berencana yang bertujuan membatasi dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah akan turut mendorong penurunan kepadatan penduduk dan secara simultan akan mengurangi pula jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan pandangan (Fei Guo dan Zhiming Cheng, 2013 p. 30) di kawasan perkotaan di China dan (Darsyah, 2013 p.34) di Sumenep, Madura.

Sebagaimana hasil penelitian-penelitian terdahulu ([Harlik, Amir dan hardiani, 2013:119](#)), ([Nizar, Hamzah, & Syahnur, 2013](#)) dan pendapat para pakar di bidang ekonomi pembangunan sekaligus membantah temuan [Khumairoh, Efi EDS, Aida, & Qomaria \(2018\)](#), bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto pada harga konstan di setiap provinsi memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan tersebut mendukung banyak temuan penelitian yang menemukan fakta yang sama sehingga alternatif kebijakan yang dapat diambil adalah Pemerintah terus mendorong program dan kebijakan yang dapat meningkatkan PDRB di masing-masing provinsi sebagai cerminan meningkatnya agregat perekonomian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mampu mendorong upaya menurunkan jumlah penduduk miskin.

Berbeda dengan temuan [Megasari, Amar, & Idris \(2015\)](#) yang menyatakan bahwa UMP (Upah Buruh) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan penelitian ini justru menemukan fakta sebaliknya. Upah Minimum Provinsi dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan namun dengan arah positif terhadap jumlah penduduk miskin di wilayah provinsi di Indonesia. Dengan meningkatnya upah buruh sebesar Rp.10.000,00 maka kemungkinan jumlah penduduk miskin di provinsi



tersebut akan naik sebesar 5 orang. Untuk itu, pemerintah di setiap Provinsi cenderung sangat berhati-hati dalam menetapkan nilai UMP karena apabila tidak disertai dengan analisis dan insentif terhadap variabel-variabel lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB dan variabel lainnya justru akan berdampak negatif terhadap upaya mengentaskan kemiskinan wilayah Provinsi di Indonesia. Alternatif kebijakan yang dapat diambil adalah memformulasikan kebijakan peningkatan nilai UMR dengan insentif lainnya seperti kemudahan terhadap kepemilikan rumah, pengurangan kepadatan penduduk melalui program KB dan transmigrasi perlu dilakukan secara bijaksana.

Berbeda dengan temuan [Susanti \(2013\)](#) dan [Septiani \(2017\)](#) penelitian ini tidak menemukan pengaruh variabel IPM atau lamanya akses pendidikan sebagaimana temuan [Harlik, Amri Amir, & Hardiani \(2013\)](#) yang memiliki pengaruh signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan kemungkinan adanya perbedaan data penelitian. Pada penelitian dengan data *cross-section* pada satu waktu sebagaimana penelitian ini, variabel IPM dan akses pendidikan cenderung akan sulit mendorong upaya pengentasan kemiskinan karena IPM dan pendidikan bersifat jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, sebagaimana kritik [Suharto \(2016\)](#) dan [Nasikun \(2003\)](#) penetapan IPM atau HDI termasuk di dalamnya akses pendidikan memiliki kelemahan karena adanya *time-lag* dalam pelaporannya sebagaimana pandangan [Cahyat \(2004:7\)](#). Selain itu, penelitian ini juga menemukan fakta tidak adanya pengaruh yang signifikan dari variabel Persentase penduduk yang merokok pada usia di bawah 15 tahun dan variabel jumlah asupan kalori di bawah 1400 kkalori per kapita per hari terhadap jumlah penduduk miskin di setiap provinsi. Namun demikian walaupun tidak signifikan. Namun dari hasil estimasi arah hubungan terdapat kecenderungan hubungan yang negatif dari variabel merokok di usia dini dan asupan kalori di bawah 1.400 kkalori per kapita perhari terhadap jumlah penduduk miskin di suatu Provinsi di Indonesia. Arah tersebut tampaknya sejalan dengan pandangan BKKBN, [Nasikun \(2003\)](#), dan [Suryawati \(2005\)](#). Untuk itu, alternatif kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi peredaran rokok pada usia dini (di bawah 15 tahun) dan meningkatkan pola konsumsi di Indonesia salah satunya aspek gizi sebagaimana diterapkan oleh BKKBN terhadap keluarga pra-sejahtera.

E. PENUTUP

Penelitian ini memberikan simpulan bahwa upaya pengentasan kemiskinan melalui upaya meredusir jumlah penduduk miskin provinsi di Indonesia yang bersifat multi-dimensional dan kompleks dapat dilakukan dengan pendekatan model kuantitatif menggunakan alat analisis regresi berganda menggunakan *Ordinary Least Squares* (OLS). Dari 13 variabel independen yang ditentukan untuk mengestimasi jumlah penduduk miskin di setiap provinsi hanya empat variabel yang signifikan mengukur jumlah penduduk miskin. Dari aspek fisik lingkungan dan kependudukan (demografi) variabel kepadatan penduduk dan persentase kepemilikan rumah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dari aspek ekonomi angka PDRB harga Konstan dan Upah Buruh memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dari aspek sosial yang diwakili indikator sektor pendidikan dan IPM tidak ada satupun variabel yang memiliki pengaruh signifikan dalam meredusir jumlah penduduk miskin. Penelitian ini juga menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan dari perilaku merokok pada anak di bawah usia 15 tahun dan asupan kalori keluarga per hari terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Namun dari analisa arah terdapat hubungan yang bersifat negatif antara perilaku merokok dan asupan kalori terhadap penurunan jumlah



penduduk miskin. Hal tersebut juga berlaku pada perilaku merokok, sehingga alternatif kebijakan pembatasan merokok anak usia di bawah 15 tahun serta di sisi lain peningkatan cukai dan pajak rokok memiliki kecenderungan akan mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Secara konkrit penelitian ini mendorong beberapa rekomendasi alternatif kebijakan untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi di Indonesia. Upaya meningkatkan akses kepemilikan rumah seperti program pembangunan rumah susun milik (rusunami), program DP nol rupiah, kredit kepemilikan rumah (KPR) yang murah dan subsidi dapat menjadi solusi dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Dari aspek pengurangan kesenjangan pembangunan melalui pengurangan kepadatan penduduk juga secara bersama-sama dengan program dan kebijakan lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana indikator PDRB dan pertumbuhan ekonomi (*Economic growth*) serta peningkatan efektivitas program keluarga berencana, transmigrasi dan penciptaan wilayah-wilayah pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini secara khusus merekomendasikan agar dalam penetapan kebijakan upah minimum provinsi (upah buruh) harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan variabel dan indikator pembangunan lainnya agar tujuan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan UMR tidak justru mendorong semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di suatu provinsi di Indonesia.

Untuk mengatasi keterbatasan dan kelemahan yang timbul dari ketidaklengkapan data *cross-section* dan metode regresi berganda menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS) dalam penelitian ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memperkaya variabel-variabel lainnya untuk menjelaskan pengukuran jumlah penduduk miskin di suatu Provinsi. Agar lebih akurat maka upaya untuk meningkatkan jumlah dan basis data dapat dilakukan misalnya dengan meningkatkan data historis (*time series*) sehingga analisis dapat dilakukan dengan panel data (*pooled data*). Selain alat analisis untuk menunjang peningkatan penelitian dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu dibangun konsep *Whole of Government* salah satunya melalui pembangunan pangkalan data (data base) bersama sehingga keterbatasan data dalam analisis fenomena kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya dapat secara efektif dan efisien dilakukan dan membawa manfaat bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- [Arsyad, L. \(1999\). *Konsep dan Pengukuran Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Universitas Terbuka.](#)
- [Azwar, I., dan Subekan, A. \(2016\). Analisis Determinan Kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2\(1 Juni 2016\), 1-26.](#)
- [Cahyat, A. \(2004 Number 2\). *Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa Model penghitungan Kemiskinan di Indonesia*. Center for International Forestry Research \(CIFOR\).](#)
- [Darsyah, M. Y. \(2013\). Small Area Estimation Terhadap Pengeluaran Per kapita di Kabupaten Sumenep dengan Pendekatan Nonparametrik. *Statistika*, 1 \(2\), 28-36.](#)
- [Dewi, S., Majid, M. A., Aliasudin, and Kassim, S. \(2018\). Dynamic of Financial Development, Economic Growth, and Poverty Alleviation: The Indonesian Experience. *South East European Journal of Economics and Business*, 17-30.](#)
- [Fei Guo, and Zhiming Cheng. \(2010, December 15\). Labour Market Disparity, Poverty, and Inequality in Urban China. *China Perspective*, 4\(15 December 2010\), 16-31.](#)
- [Gerke, S. \(2003\). Poverty Alleviation and Measures Poverty in Indonesia. *Internationales Asienforum*, 4 \(1-2\), 85-105.](#)
- [Gujarati, D. \(1997\). *Basic Econometrics Cetakan Kelima*. Jakarta: Penerbit Erlangga.](#)



- [Hadi, R., Wahyudin, U., Ardiwinata, J., and Abdu, W. J. \(2015\). Education and microfinance: an alternative approach to the empowerment of the poor people in Indonesia. *SpringerPlus Open Journal*, 4-244.](#)
- [Handalani, Radite Teguh \(2018\) Determinant Indeks Pembangunan Manusia Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2 \(2\), 118-137](#)
- [Harlik, Amri Amir, dan Hardiani. \(2013, Oktober\). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan dan Pengangguran di Kota Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 1\(2\), 109-120.](#)
- [Hatta, M., dan Azis, A. \(2017\). Analisis Faktor Determinan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2005-2015. *Jurnal Riset Unibos Makasar*, 3 \(8\), 16-32.](#)
- [Isdijoso, W., Suryahadi, A., dan Akhmadi. \(2016\). *Penetapan Kriteria dan Variabel Pendataan Penduduk Miskin yang Komprehensi dalam rangka Perlindungan Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota*. The SMERU Research Institute.](#)
- [Jaelani, A. \(2016, September\). Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam. pp. 1-20.](#)
- [Khumairoh, N. S., Efi EDS, Aida, N., dan Qomaria, N. \(2018\). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2007-2016 . *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 105-116.](#)
- [Manek, M., dan Badrudin, R. \(2016\). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Telaah Bisnis*, 12, 81-98.](#)
- [Megasari, H., Amar, S., dan Idris. \(2015\). Analisis Perekonomian dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3\(6\), 1-18.](#)
- [Nachrowi, D. N., dan Usman, H. \(2006\). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Data Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.](#)
- [Nahar, F. H., and Arshad, M. M. \(2017\). Effect of Remittances on Poverty Reduction: The Case of Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 163-177.](#)
- [Nasikun. \(2002\). Penanggulangan Kemiskinan: Kebijakan dalam Perspektif Pergerakan Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6 \(1\), 1-16.](#)
- [Nizar, C., Hamzah, A., dan Syahnur, S. \(2013\). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungannya Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1\(2\), 1-8.](#)
- [Nurkse, R. \(1971\). *The Theory of Development and The Idea of Balance Growth In: Mountjoy A.B. \(eds\) Developing the Underdeveloped Countries. Geographical Readings. Palgrave Macmillan*. London: Palgrave Macmillan.](#)
- [Peilin Li, and Haiying Ma. \(2015\). An Empirical Analysis of Economic Development in Northwest China: Based on the Vicious Circle of Poverty Demands Theory. *International Journal of Business Administration*, 6\(4\), 57-63.](#)
- [Pratama, Y. C. \(2014\). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 4 \(2\), 210-223.](#)
- [Rosadi, D. \(2012 \). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.](#)
- [Santosa, B. \(2013\). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 5 \(2\), 130-143.](#)
- [Septiani, N. \(2017\). *Analisis Determinan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016*. Universitas Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Surakarta.](#)
- [Suharto, E. \(2009\). Menengok Kriteria Kemiskinan di Indonesia: Menimbang Indikator Kemiskinan Berbasis Hak. *Jurnal Analisis Sosial*, 14 \(2\), 31-39.](#)
- [Suryawati, C. \(2005\). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 08 \(03\), 121-129.](#)



Susanti, S. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. *Jurnal Matematika Integratif*, 9 (1), 1-18.

Tambunan, T. (2012). Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah . *Jurnal Bina Praja* , 73-92.

Ul-Haq, M. (2003). *The Birth of Human Development Index*. Oxford, UK: Oxford University Press.

Data Publikasi

Badan Pusat Statistik, Data Dinamis, diunduh dari website: www.bps.go.id, data diolah.

World Bank, Human Development Report, 2011 s.d 2017 diunduh pada www.worldbank.org.

